

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang membedakan dengan organisasi lainnya. Warididn dan Masrurukhin (2006) menyatakan budaya organisasi diartikan sebagai nilai-nilai, simbolsimbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi anggota organisasi tersebut merasa berbeda dengan organisasi lain. Senada dengan Nupakorn dan Phapruek (2010) yang menyatakan bahwa budaya organisasi didefinisikan sebagai dukungan pengembangan etika dan teknologi pelatihan terus-menerus untuk meningkatkan hubungan dan keselarasan para anggota organisasi dan pengaruh yang penting terhadap setiap aspek perusahaan. Oleh karena itu budaya organisasi perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi pemersatu dan pemacu gerak langkah anggota organisasi.

Fenomena yang terjadi di Indonesia penyebab kurang berhasilnya good governance disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya organisasi. Hal ini senada dengan Effendi (2005) yang menyatakan salah satu penyebab kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik karena pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berperan penting di dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dalam upaya merealisasikan

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good governance.

Akuntansi sektor publik juga terkait erat dengan paradigma dan desentralisasi fiskal yang saat ini sedang berjalan.kaitannya dengan reformasi sektor publik, otonomi daerah menjadi salah satu bagian dari reformasi sector publik itu sendiri. Otonomi memberikan keleluasan pada daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara luas (Mardiasmo, 2002). Pendapat otonomi diatas sejalan dengan yang dikemukakan Lemius (1986) bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi,dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tonggak di mulainya Otonomi Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat memonitor akuntabilitas pemerintah daerah. Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah terdiri dari beberapa dimensi yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (Mahmudi, 2010:28)

Akuntansi sektor publik tersebut memiliki peran untuk menyiapkan laporan

keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Santoso dan Yohanes (2008) menemukan bukti bahwa secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Pendapat lainnya dikemukakan Kelkar (2009) menyatakan bahwa akuntansi memberikan kerangka dasar yang mempengaruhi kualitas dari good governance. Dari kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa akuntansi khususnya akuntansi sektor publik memiliki peranan yang sangat penting dalam terciptanya good governance di pemerintah daerah.

Efektivitas penerapan akuntansi dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya organisasi tersebut berpengaruh terhadap tindakan manajer, pengambilan keputusan, dan juga termasuk pemilihan sistem kontrol. Dengan demikian, budaya organisasi mempengaruhi perilaku pekerja untuk efektivitas praktek akuntansi, seperti, integrasi informasi keuangan, pembentukan pelaporan, diseminasi laporan keuangan, informasi akuntansi dapat dipercaya (Hanpuwadal, Nupakorn dan Ussahawanitchakit, Phapruke, 2010).

Menurut penelitian terdahulu Oleh Urif Santoso dan Yohanes (2008) di dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Dan juga penelitian terdahulu dari Sari Eka Nurmala (2012) tentang pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik menyatakan bahwa semua variabel dependen berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik. Dapat lainnya juga dikemukakan Vijay Kelkar (2009) yang

menyatakan bahwa akuntansi memberikan kerangka dasar yang mempengaruhi kualitas dari goodgovernance.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi domain publik pada (Mardiasmo, 2009). Dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Agar tujuan-tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik dapat tercapai maka perlu adanya peningkatan terhadap efektivitas penerapan akuntansi, khususnya pada akuntansi sektor publik. Pengembangan akuntansi dapat dijelaskan baik dari segi faktor budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan adalah kedua faktor yang membentuk konteks dimana akuntansi beroperasi, dan pengaruh dari dampak budaya pada akuntansi merupakan kontribusi penting dari literatur akuntansi internasional, Cingdem Solasand Sinan Ahyan (2008). Budaya perusahaan dapat mempengaruhi efektivitas penerapan akuntansi. Budaya organisasi dapat membentuk tindakan manajer dan pengambilan keputusan, termasuk pilihan sistem kontrol. Dengan demikian, budaya organisasi mempengaruhi perilaku pekerja untuk efektivitas praktek akuntansi, seperti, integrasi informasi keuangan, pembentukan pelaporan, diseminasi laporan keuangan, informasi akuntansi dapat

dipercaya, (Hanpuwadal, Nupakorn dan Ussahawanitchakit,Phapruke,2010).

Budaya organisasi adalah suatu sistem makna atau system nilai bersama yang ada di dalam suatu organisasi. Hanpuwadal, Nupakorn dan Ussahawanitchakit,Phapruke (2010) menyatakan budaya organisasi didefinisikan sebagai dukungan perusahaan untuk pengembangan etika dan teknologi pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan hubungan dan keselarasan para anggota organisasi dan pengaruh yang penting terhadap setiap aspek dari operasi perusahaan. Oleh karena itu budaya organisasi perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi pemersatu dan pemacu gerak langkah anggota organisasi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “ **(Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Studi Pada SKPD di Kabupaten Sabu Raijua)**”.

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka persoalan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Eektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap penerapan efektivitas akuntansi sektor publik .

1.4.2.Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasana keilmuan akuntansi terutama akuntansi sektor publik, serta penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktisi

❖ Bagi Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami tentang budaya organisasi

terhadap penerapan efektivitas akuntansi sektor publik

❖ Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan masukan dan dapat mengetahui bahwa pentingnya budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik.

❖ Bagi Pembaca

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang budaya organisasi terhadap efektivitas akuntansi sektor publik.